



**Judul** : Tiap tahun dapat dana, PTKL tidak terpacu meningkatkan mutu  
**Tanggal** : Sabtu, 13 September 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Tiap Tahun Dapat Dana PTKL Tidak Terpacu Meningkatkan Mutu

ANGGOTA Komisi X DPR Mercy Chriesty Barends menilai kualitas Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) masih cukup rendah. Padahal, PTKL mendapatkan dana yang sangat besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari hasil evaluasi, akreditasi PTKL rata-rata masih di level Baik, tapi yang unggul hanya sedikit sekali. Ini membuat PTKL cenderung business as usual atau masih memakai pola lama. "PTKL tidak terpacu meningkatkan mutu karena merasa setiap tahun pasti mendapat dana," jelas Mercy dalam keterangannya, Jumat (12/9/2025).

Mercy mendorong pemberlakuan payung regulasi yang bisa membuat persaingan antar perguruan tinggi sehat. Pasalnya, jika semua diperlakukan setara, akan tercipta kompetisi yang berdasar pada prinsip meritokrasi. Tidak ada lagi yang merasa diistimewakan hanya karena statusnya PTKL.

Anggota Fraksi PDIP itu juga menyoroti kualitas sumber daya manusia (SDM) dosen di PTKL. Jumlah profesor dan doktor di PTKL masih sangat kecil, hanya sekitar 0,7 persen. Padahal kualitas tenaga pengajar adalah kunci mutu pendidikan. "Kalau PTKL terus bergantung pada dana tanpa dorongan kualitas, mereka tidak akan bisa menghasilkan SDM unggul," tegasnya.

Selanjutnya, Mercy juga mengusulkan perombakan sistem

akreditasi. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) hanya membuat biaya akreditasi sangat mahal dan birokratis. "Seluruh persyaratan akreditasi mesti berlaku sama antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN), swasta (PTS) dan PTKL, sehingga lebih efisien dan tidak membebani kampus," katanya.

Anggota Komisi X DPR La Tinro La Tunrung menambahkan, keberadaan PTKL perlu dirumuskan untuk mewujudkan kontribusi yang proporsional, relevan, dan bisa bersinergi dengan seluruh ekosistem pendidikan tinggi. Jangan ada tumpang tindih yang justru merugikan. "Apalagi kalau sampai PTKL ini disalahgunakan untuk tujuan komersial," tegasnya.

La Tinro menegaskan, Panitia Kerja (Panja) PTKL Komisi X DPR berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan Pemerintah. Dalam pengawasan tersebut, Panja bersama Kemendikti-Saintek sepakat menata kembali penyelenggaraan PTKL secara menyeluruh.

Saat ini, kata politikus Partai Gerindra itu, mayoritas PTKL masih berada di level akreditasi menengah. Hanya sebagian kecil yang meraih predikat Unggul atau A. Kualitas dosen juga dinilai terbatas, baik dari sisi kualifikasi akademik maupun produktivitas riset. "Kondisi ini berdampak pada pengembangan kurikulum, riset, dan daya saing pendidikan tinggi kita," jelasnya. ■ **PYB**